

ANALISIS PSIKOLOGIS TENTANG NALAR POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA TIAP PEMILIHAN UMUM

Pahrizal Ikrom

Universitas Nahdlatul Wathan
pahrizaliqrom@gmail.com

Abstract

Penelitian ini membahas larangan keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam urusan politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Meskipun dilarang secara hukum, PNS sebagai makhluk politik memiliki dorongan untuk terlibat dalam politik, dan banyak individu yang memanfaatkan posisi dan fasilitas negara untuk memajukan karir mereka melalui cara politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana individu sebagai makhluk bebas memenuhi kebutuhan politik mereka sambil menjadi PNS dan menghadapi larangan keterlibatan politik. Studi ini menyimpulkan bahwa keterlibatan politik oleh PNS tidak dapat dihindari karena manusia adalah makhluk politik. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjalankan sistem pemantauan dan penegakan yang lebih efektif untuk mengatur keterlibatan politik oleh PNS dan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya mempertahankan netralitas dan objektivitas saat menjalankan tugas mereka. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang dinamika yang rumit dari keterlibatan politik oleh PNS dan menekankan perlunya penelitian lebih lanjut di bidang ini.

Kata Kunci : Administrasi Publik, PNS, Politik, Netralitas, Kebutuhan Bertingkat



Pendahuluan

Menurut salah seorang perintis Ilmu Administrasi, Dwight Waldo¹ bahwa administrasi publik memiliki 2 (dua) pengertian; pertama Administrasi sebagai sebuah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Sedangkan yang kedua, administrasi sebagai suatu seni dan ilmu yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Sedangkan menurut pandangan Felix A. Nigro² menjelaskan administrasi publik merupakan suatu aktivitas kerjasama kelompok dalam ruang lingkup publik, diantaranya; ruang yudikatif, legislatif dan eksekutif sebagai bentuk upaya menciptakan kesejahteraan publik.

Setidaknya terdapat 23 pengertian tentang Ilmu Administrasi Publik dari berbagai pakar. Dua di atas merupakan pendapat yang sering dipergunakan oleh para sarjana administrasi publik.

Berbicara masalah pilkada berarti berbicara masalah pesta demokrasi di tingkat daerah, baik tingkat satu (provinsi) maupun tingkat dua (kabupaten). Pesta demokrasi memungkinkan rakyat untuk memilih wakilnya sendiri sebagai pengelola, manager, pemimpin untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka. Demokrasi berasaskan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, itu artinya rakyatlah yang berdaulat menentukan dirinya memilih dan dipilih. Namun semeriah apapun perayaan pesta demokrasi yang digelar ada beberapa orang harus menahan diri untuk tidak ikut atau diikutkan, sebab dapat melanggar kode etik di mana mereka bekerja secara profesional. Mereka yang dalam tulisan ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjaga diri kalau tidak mau diberi sanksi bertahap yang berujung pemecatan. Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus menjaga netralitas mereka guna menjalankan kinerja birokrasi pemerintahan.

¹ J Bennett, *The Enchantment of Modern Life* (degruyter.com, 2016) <<https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9781400884537/html>>.

² Pan Suk Kim, 'The Development of Modern Public Administration in East Asia', *International Review of Administrative Sciences*, 83.2 (2017) <<https://doi.org/10.1177/0020852316685162>>.



Aparatur paling miris kondisi kebatinannya, diminta netral dalam kontestasi politik namun mereka memiliki hak suara. Jika mereka mempunyai hak suara, maka tentunya mereka berhak menyalurkan pilihannya sesuai dengan harapan mereka. Mereka berhak mengetahui *Track Record* calon Pejabat politik yang akan mereka pilih.

Netralitas birokrasi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Netralitas merupakan salah satu azas penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN dalam UU no 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.³ Namun apa yang terjadi di lapangan, Banwaslu tetap saja menemukan adanya dugaan mobilisasi ASN dan Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh calon Pertahana. Pertanyaanya kemudian apakah ancaman sanksi administrasi dan sanksi hukum yang diterapkan kurang memberikan efek jera atau ada faktor lain yang mempengaruhinya.

Fakta inilah yang membuat rusak implementasi Administrasi Publik karena Politik, namun Politik merupakan bagian dari Administrasi Publik. Meskipun demikian kebijakan perlu di koreksi agar lebih tepat kedepannya, sehingga aparatur dapat bekerja secara Profesional dan tentunya kenyamanan.

Adapun beberapa larangan tersebut ialah:

1. ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah.
2. Dilarang memasang spanduk promosi kepada calon.
3. Dilarang mendekati Parpol terkait dengan pungusulan dirinya atau orang lain menjadi calon.
4. Dilarang mengunggah, memberikan like, atau mengomentari dan sejenisnya serta menyebarkan gambar maupun pesan visi misi calon baik di media online atau media sosial.
5. Dilarang foto bersama calon .
6. Dilarang menghadiri deklarasi calon, baik itu dengan atau tanpa atribut Parpol.⁴

³ Gustiana & Achmad Zulfikar, dalam Proseding Seminar Nasional Pilkada Serentak, Universitas Hasanudin, 10 November 2015. h 1-261.

⁴ <http://aceh.tribunnews.com/2018/02/20/7-larangan-pns-di-tahun-politik-dari-beri-like-sosmed-hingga-foto-bareng?page=2> 06:12 06/05/2018



Dalam psikologi kepribadian adalah produk dari faktor perkembangan dan faktor sosial.⁵ kita mengenal teori psikoanalisa, behavior dan humanistik di mana seorang manusia bertindak dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Psikoanalisa berbicara tentang tindakan seseorang yang lebih banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya (Id, Ego, Super Ego). Sedangkan behavior berpendapat bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia tumbuh dan berkembang. Berbeda dengan psikoanalisa dan behavioristik, humanistik berbicara tentang tindakan manusia yang dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan dasar psikologis yang bertingkat.

Tindakan manusia dalam konteks ini dapat dilihat dari tiga mazhab besar ilmu psikologis di atas. Apapun bentuk aktivitasnya bisa dipastikan memiliki faktor-faktor pemicu, baik secara sadar maupun tidak disadari dalam diri (internal) dan juga faktor yang melatarinya dari luar (eksternal). Sedangkan manifestasinya berupa realisasi dari tindakan itu sendiri, seperti berjalan, berfikir, membaca, makan dan lain sebagainya. Politik sebagai sebuah aktivitas sosial sudah pasti memiliki faktor pemicu baik yang ditimbulkan dari internal (kesadaran) maupun eksternal (lingkungan). Hubungan saling kait mengait antara pengaruh internal dan eksternal ini dinamakan “nalar politik” menurut Muhammad Abed Al Jabiri dalam buku yang berjudul Sosiologi Politik Islam.

“Menurutnya, sebagai “nalar” faktor pemicu dan juga manifestasi dari aktivitas politis, tunduk kepada logika internal yang menentukan dan mengorganisir relasi-relasi yang ada di dalamnya, yaitu logika dengan ciri, prinsip dan mekanisme yang bisa deskripsikan. Sedangkan sebagai “politik”, fungsinya bukan untuk memproduksi pengetahuan melainkan mempraktikkan kekuasaan pengendalian atau menjelaskan cara-cara mempraktikkan kekuasaan tersebut.”⁶

Dengan menggunakan pendekatan psikoanalisa alam bawah sadar Sigmund Freud dan bawah sadar kolektif Carl Jung, Abed al-Jabiri membongkar nalar politik

⁵ Bulent Akot, ‘The Perspective of Psychological Freedom and Avoiding Freedom According to Erich Fromm’, *Hamdard Islamicus*, 43.2 (2020).

⁶ M. Abed al-Jabiri, *Sosiologi Politik Islam “pendekatan Historis-kritis*, terj. M. Firdaus (Jakarta: Gelar Hidup, 2016), h. vii



Islam yang dalam kesimpulannya adalah masyarakat Islam arab tergerak oleh tiga faktor pemicu alam bawah sadar kolektif yang pertama akidah (ideologi). Ketika masyarakat Islam dihadapkan pada pilihan-pilihan secara tidak sadar akan diarahkan dengan faktor pemicu “kesamaan ideologi”, islam versus kafir, sehingga wajar jika masyarakat muslim akan memilih dan memperjuangkan seorang calon pemimpin atas nama keyakinannya, memperjuangkan akidah.

Kedua kabilah (kesukuan), apabila masyarakat muslim dihadapkan dengan aktivitas politik maka secara otomatis melalui alam bawah sadar kolektif mereka akan memilih dan mendukung orang yang lebih dekat dengan suku mereka atau kesamaan asal usul dan lain sebagainya. Ketiga ghanimah (ekonomi), atas dasar kekaguman dan keyakinan orang akan lebih cenderung memilih dan memperjuangkan seseorang yang lebih mapan, kaya dan darah biru dari pada orang yang biasa-biasa sebab dalam pemikiran mereka kecil kemungkinan akan melakukan korupsi atau terbersit dalam pikiran mereka orang kaya akan bisa membiayai perjuangan cost perjuangan politik mereka.

Namun dalam paper ini penulis tidak akan membahas lebih dalam tentang nalar politik Abed al-Jabiri lebih dalam, penulis akan meminjam konsep “nalar” dan konsep “politik” sebagai acuan membedah dan membatasi pembahasan hanya pada kebutuhan bertingkat yang dicetuskan oleh Abraham Maslow, kemudian dikaitkan dengan nalar politik para oknum PNS yang disumsikan melanggar PP Nomer 5 Tahun 2014.

Nalar PNS Berhadapan Dengan Pemilu.

Nalar sebagaimana kita telah sepakati adalah faktor pemicu dan juga manifestasi dari segala aktivitas, sedangkan politik adalah aktivitas-aktivitas atau praktik langsung yang berkaitan dengan politik itu sendiri, bukan ilmu tentang politik. Marilah kita membedah nalar politis PNS menggunakan pendekatan Humanitis Abraham Maslow.



Abraham Maslow⁷ memberikan kita *guidence* mengenai bagaimana mengenal kebutuhan-kebutuhan bertingkat pada diri manusia. Pokok Teori Psikologi Humanistik Abraham Maslow adalah Prinsip holistic, Individu, Manusia tidak pernah diam, Individu sebagai keseluruhan, Manusia pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik atau tepatnya netral, Individu sebagai Kesatuan Terpadu, Manusia berpotensi kreatif, *Self-fulfillment*, Manusia memiliki bermacam-macam kebutuhan.

Secara alamiah seorang manusia dimotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya baik secara individu maupun hubungannya sebagai makhluk sosial. Kebutuhan kebutuhan mendesak membuat seseorang semisal makanan dan minuman harus dan dengan segera dipenuhi. Begitu kebutuhan-kebutuhan paling dasar tadi sudah terpenuhi maka kebutuhan-kebutuhan yang lain akan mengikuti.

Menurut Abraham Maslow manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan bertingkat yang akan memotivasi mereka untuk segera memenuhinya. Kebutuhan bertingkat itu tersusun secara holistik dan berlaku bagi sebagian besar manusia. Maslow mengembangkan gagasannya lebih lanjut dan dikenal dengan sebutan hirarkis kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Kebutuhan Fisiologis.**

Ini termasuk kebutuhan-kebutuhan manusia terhadap oksigen, air, protein, garam, gula, karbohidrat, nutrisi, kalsium serta berbagai mineral, vitamin, kebutuhan pH yang seimbang, suhu udara yang seimbang, bergerak, berfikir, buang air dan keringat, menghindari bahaya penyakit, berhubungan seks dan lain sebagainya.⁸ Menurutnya kebutuhan-kebutuhan ini bersifat individual

2. **Kebutuhan Rasa Aman.**

⁷ Abraham harold maslow dilahirkan di Brooklyn, New York, pada tanggal 1 april, 1908. Maslow mengawali karir akademis dan profesionalnya dengan memegang jabatan sebagai asisten instruktur psikologi di Universitas wisconsin (1930-1934), E. Koswara, Teori-teori kepribadian, (bandung: eresco, 1991), h. 110

⁸ George Boeree, Personality Theories “melacak kepribadian anda bersama psikolog dunia”, (Jogjakarta: prisma sophie, 2010), h. 252



Ketika kebutuhan fisiologis terpenuhi maka secara otomatis lapisan kebutuhan yang kedua akan muncul. Ini mencakup toleransi antar tetangga, pekerjaan dan tempat kerja yang aman, jenjang karir, perencanaan masa pensiun yang matang, jaminan sosial dan jaminan kesehatan dan lain sebagainya.

3. **Kebutuhan Cinta Dan Rindu.**

Ketika kebutuhan dasar fisiologis dan rasa aman telah terpenuhi maka kebutuhan lapis ketiga akan muncul. Seseorang akan mulai merasa butuh teman, kekasih, anak dan hubungan serius berdasarkan perasaan dan lain sebagainya. Dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan ini adalah timbul rasa cemas akan kesendirian dan kesepian,

4. **Kebutuhan Harga Diri.** Setelah kebutuhan dasar fisiologi, rasa aman, cinta dan rindu telah terpenuhi maka kebutuhan akan harga diri pada diri manusia akan timbul. Namun menurut Maslow kebutuhan akan harga diri ini terbagi menjadi dua yaitu bentuk yang lemah dan bentuk yang kuat.⁹



(Gambar: Kebutuhan Bertingkat Abraham Maslow)

⁹ Ibid. Bentuk yang lemah adalah ketika manusia membutuhkan dirinya untuk dihargai oleh orang lain, kebutuhan terhadap status, kemuliaan, kehormatan, perhatian, reputasi, apresiasi bahkan dominasi. Sementara yang kuat adalah kebutuhan akan percaya diri, kompetensi, kesuksesan, independensi dan kebebasan.

“Maslow menganggap kebutuhan-kebutuhan defisit tadi sebagai kebutuhan untuk bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang pun sebenarnya memperjelas kebutuhan kita akan kesehatan. Dia juga menganggap kebutuhan-kebutuhan ini sudah ada sejak kita lahir persis sama seperti insting”¹⁰

Pada saat kondisi tidak menguntungkan atau pada kondisi di mana bertahan hidup “*survive*” terancam, seseorang dapat mundur ke level yang lebih rendah. Maslow meyakini bahwa jika seseorang memiliki segenap kemampuan serta kesempatan serta lingkungan penunjang untuk mencapai kebutuhan tertentu maka ia akan mampu mengungkapkan segenap kemampuan yang dimilikinya.

Politik PNS Dan Kebutuhan Bertingkat

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dituntut untuk netral dari hal-hal yang berbau politik praktis sebab ia sebagai pelayan publik harus memfokuskan diri melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat. Selain juga sistem birokrasi sebagaimana teori organisasi birokrasi Marx Weber yang mengharuskan seorang birokrat tidak mempunyai kepentingan pribadi apapun dalam menjalankan jabatannya. Sehingga seluruh aktivitas seorang birokrat adalah *rationality purposefull actions* yang dikendalikan oleh rasionalitas tindakan.¹¹

Karena itu mengatur Birokrasi bukan pekerjaan yang ringan bagi para birokrat kita. Perlu kolaborasi yang kuat dibangun bersama lembaga independen diluar rutinitas formal birokrasi seperti; lembaga pengawas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Lembaga Mediator antara Pemerintah dan Swasta dalam menciptakan Sumber daya profesional untuk mengelola Birokrasi¹².

Birokrasi bagi Weber seperti sistem mesin. Dalam sistem mesin apa yang dimasukkan, apa yang diolah dengan apa yang dihasilkan dapat diprediksi. Jadi tindakan-tindakan manusia dalam sistem birokrasi layaknya komponen mesin, garis

¹⁰ Ibid. 255.

¹¹ Max Weber, *On Charisma And Institution Building*, (chicago an London: university of chicago Press, 977)

¹² Saleh Choirul, Zauhar Soesilo, Supriyono Bambang, Islamy M. I rfan 2013. *Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Aparatur*. Universitas Brawijaya Press



perintah yang hirarkis dan garis koordinasi begitu jelas. Jika terdapat komponen-komponen di dalam mesin rusak maka cara gampang untuk memperbaikinya dengan mengganti komponen yang rusak tadi. Namun Weber tidak menyadari bahwa manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki kehendak bebas, manusia seperti yang kita bahas di atas memiliki motif-motif pemicu yang diolah baik internal maupun eksternalnya sehingga melahirkan tindakan-tindakan.

Teori birokrasi model mesin sebenarnya sangat efektif menghasilkan produk-produk kebijakan dan pelayanan yang bisa kita lihat dan prediksi hasilnya. Menurut Erich From dalam konteks ini anggota-anggota dalam mesin birokrasi harus bekerja sebagai mesin industri yang terorganisir secara kolektif agar dapat berjalan lancar dan tidak boleh ada friksi ataupun intrupsi. Mereka bekerja sebagai mesin dan tidak memiliki kepentingan pribadi sebagai roda gigi mesin birokrasi yang fungsi dan aktivitasnya ditentukan oleh seluruh struktur organisasi di mana mereka bekerja.¹³

Namun kita juga harus menyadari bahwa manusia bukanlah mesin, ia merupakan makhluk bebas yang segala tindakannya dipengaruhi oleh berbagai macam pengaruh. Ia tidak cukup dengan aturan atau perintah untuk bertindak, manusia bertindak tidak cukup dengan modal pengetahuannya, namun butuh kepercayaan, niat dan konsisten untuk bertindak. PNS tidak cukup hanya tahu aturan untuk tidak melanggar, namun juga butuh kepercayaan, niat dan konsistensi untuk melakukan sesuai tugas dan fungsinya sebagai birokrat sejati.

Kebutuhan bertingkat Abraham Maslow di atas juga dapat kita gunakan untuk melihat fenomena oknum PNS ikut terlibat baik sebagai tim sukses maupun simpatisan seorang calon kepala daerah. Yang harus digarisbawahi adalah selain sebagai PNS, Birokrat atau Komponen dari mesin birokrasi sekalipun, PNS juga adalah seorang manusia biasa sebagai makhluk berkebutuhan baik secara individu maupun sosial. Maka mereka dalam proses dinamika kehidupan tidak mampu

¹³ Erich Fromm, *Dari Perkembangan Menuju Sosialisme Humanistik*, (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2016), h. xxxviii



terlepas dari yang namanya motivasi untuk bertindak akan kebutuhan-kebutuhan sebagai sebagaimana telah dibahas di atas.

Sebagai seorang manusia biasa kebutuhan level pertama PNS sama seperti kebutuhan-kebutuhan manusia yang lain, Ini termasuk kebutuhan-kebutuhan manusia terhadap oksigen, air, makanan, Uang (gaji).¹⁴ Namun kita harus sadari bersama butuhan manusia dalam konteks ini bukan semata-mata gaji dan tunjangan namun mereka juga membutuhkan rasa aman dalam bekerja, rasa ketidak nyamanan membuat mereka harus mencari atau bahkan menciptakan rasa aman bagi dirinya. Cara-cara mencari dan mewujudkan rasa aman, rasa toleransi dalam dunia kerja inilah yang dalam pembahasan ini kita sebut dengan tindakan politik. Tindakan politik bukan semata-mata politik praktis (pemilu) namun serangkaian upaya-upaya untuk mewujudkan keinginan pribadi dengan strategi-strategi yang dapat diukur.

Jika pun dalam dunia kerja, rasa aman toleransi antar rakan kerja, pekerjaan dan tempat kerja yang aman dan kondusif, jenjang karir, perencanaan masa pensiun yang matang, jaminan sosial dan jaminan kesehatan dan lain sebagainya, itu telah diraih maka secara otomatis kebutuhan akan muncul kebutuhan yang lain. Kebutuhan akan harga diri pada diri PNS akan timbul, yang dimaksud kebutuhan akan harga diri ini ialah ketika PNS membutuhkan untuk dihargai oleh orang lain, kebutuhan terhadap status, kemuliaan, kehormatan, *previllage* (hak istimewa), perhatian, reputasi, apresiasi bahkan dominasi. Sementara yang kuat adalah kebutuhan akan percaya diri, kompetensi, kesuksesan, independensi dan kebebasan.

Dari uraian di atas kita dapat memahami bahwa seberapa ketat aturan yang diterapkan bukan lantas memberi efek jera, namun membuat Oknum PNS mencari-cari cara untuk mewujudkan keinginan-keinginan pribadi guna memuaskan kebutuhan-kebutuhan bertingkat mereka. PNS bukanlah mesin yang dapat diatur tanpa memiliki pikiran untuk bertindak, mereka setiap detiknya memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk bertindak. Memberikan gaji dan tunjangan

¹⁴ protein, garam, gula, karbohidrat, nutrisi, kalsium serta berbagai mineral, vitamin, kebutuhan pH yang seimbang, suhu udara yang seimbang, bergerak, berfikir, buang air dan keringat, menghindari bahaya penyakit, berhubungan seks dan lain sebagainya.



sebesar apapun ketika kita memahami psikologis mereka sebagaimana penjelasan di atas maka kebutuhan selain gaji dan tunjangan akan mereka cari dan wujudkan.

Membongkar Keterlibatan ASN Dalam Politik

Jika kita sepakat bahwa mesin birokrasi (yang di dalamnya kita sebut dengan PNS) harus bebas dari politik praktis, maka kebutuhan-kebutuhan individu tadi harus segera difahami oleh atasan. Sebab jika hal ini dinafikan, maka penyelewengan-penyelewengan jabatan, anggaran dan lain-lain akan terus terjadi. Seberapapun ketat aturan tersebut, maka oknum yang telah lama mencari cara-cara mewujudkan keinginannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa motif PNS dekat dan bahkan dengan terang-terangan menjadi tim sukses dalam pilkada itu dapat kita pilah-pilah menjadi beberapa alternatif kemungkinan.

1. Mencari jabatan
2. Mengamankan posisi
3. Agar tidak dimutasi ke lokasi kerja yang lebih jauh dari tempat tinggal
4. Agar tidak dinonjobkan
5. Jenjang karir

Tentu alternatif kemungkinan ini masih bisa diperdebatkan, namun dari ke lima alternatif itu dapat mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, rasa nyaman di lokasi kerja (kantor), kebutuhan rasa rindu dan kebutuhan akan harga diri. Tugas pimpinan bukan menjeneralisir semua dengan aturan yang sama, namun mengerti betul *person to person* sehingga tindakan prefentif dapat dilakukan sedini mungkin, bukan malah *proaktif self identity* seperti bertindak setelah ada masalah.

Yang perlu kita fahami bersama adalah politik berbicara aktivitas merebut dan mempertahankan kekuasaan, sehingga memegang kekuasaan barti dapat mewujudkan segala ide dan keinginan termasuk lima ide di atas. “*ok, you get a point, but you dont have the power*”. Dalam politik seberapapun bagus ide dan



gagasan kita namun tidak memegang atau dekat dengan kekuasaan maka sulit untuk mewujudkannya.

Karena PNS adalah manusia biasa yang penuh dengan motif-motif, keinginan dan cita-cita dalam hidupnya maka bermain seni dalam politik adalah salah satu pilihan tindakan untuk mewujudkan motif-motif, keinginan dan cita-cita tersebut..

Kesimpulan

Dari penjabaran di atas kita dapat memahami bahwa PNS sebagai manusia biasa tidak mampu terlepas dari kebutuhan-kebutuhan bertingkat teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow yaitu:

1. Kebutuhan Fisiologis.

Ini termasuk kebutuhan-kebutuhan manusia terhadap oksigen, air, protein, garam, gula, karbohidrat, nutrisi, kalsium serta berbagai mineral, vitamin, kebutuhan pH yang seimbang, suhu udara yang seimbang, bergerak, berfikir, buang air dan keringat, menghindari bahaya penyakit, berhubungan seks dan lain sebagainya. Menurutnya kebutuhan-kebutuhan ini bersifat individual

2. Kebutuhan Rasa Aman.

Ketika kebutuhan fisiologis terpenuhi maka secara otomatis lapisan kebutuhan yang kedua akan muncul. Ini mencakup toleransi antar tetangga, pekerjaan dan tempat kerja yang aman, jenjang karir, perencanaan masa pensiun yang matang, jaminan sosial dan jaminan kesehatan dan lain sebagainya.

3. Kebutuhan Cinta Dan Rindu.

Ketika kebutuhan dasar fisiologis dan rasa aman telah terpenuhi maka kebutuhan lapis ketiga akan muncul. Seseorang akan mulai merasa butuh teman, kekasih, anak dan hubungan serius berdasarkan perasaan dan lain sebagainya. Dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan ini adalah timbul rasa cemas akan kesendirian dan kesepian,



4. **Kebutuhan Harga Diri.**

Setelah kebutuhan dasar fisiologi, rasa aman, cinta dan rindu telah terpenuhi maka kebutuhan akan harga diri pada diri manusia akan timbul. Namun menurut Maslow kebutuhan akan harga diri ini terbagi menjadi dua yaitu bentuk yang lemah dan bentuk yang kuat.

Dengan mengetahui kebutuhan bertingkat tersebut maka seorang pimpinan atau rakan kerja dari oknum yang melakukan pelanggaran administrasi maupun hukum dapat melakukan semacam *early warning* terhadap yang lain. Maka dalam kesimpulan ini penulis ingin menyarankan agar setiap triwulan atau setiap kali penyelenggaraan pemilu harus ada kesepakatan bersama (selain aturan pusat) sebagai bentuk dari fakta integritas selama musim pemilu.

Secara manusiawi setiap orang berpolitik untuk mewujudkan ide-ide. Dari penjabaran di atas tindakan politik bukan semata-mata melakukan kampanye merebut dan mempertahankan kekuasaan seperti yang kita dengar selama ini, namun politik hakikatnya adalah cara-cara atau strategi mewujudkan keinginan individu maupun kelompok. Kekuasaan adalah satu bentuk dari batu loncatan atau trigger tujuan berpolitik itu sendiri sebab dengan kekuasaan orang mampu merencanakan, mengorganisasikan, dan melakukan apa saja yang ia inginkan.

Curah gagasan pertriwulan perlu dilakukan demi mengetahui karakter serta kebutuhan bertingkat setiap individu. Curah gagasan dimaksudkan untuk mendengar keluh kesah setiap anggota dan belajar saling mendengarkan sebagai upaya saling menghargai dan menciptakan rasa aman dan nyaman dengan rekan kerja, bukan malah saling sikut demi mendapatkan jabatan tertentu.

Hasil dari curah gagasan inilah yang kita sebut dengan komitmen bersama, entah dalam bentuk fakta integritas PNS atau istilah lain yang terkait. Komitmen bersama itu akan dijalankan secara bersama-sama dan dalam prosesnya setiap anggota harus saling mengingatkan. Pertemuan berikutnya merupakan evaluasi dari komitmen yang telah disepakati bersama. Sehingga kebutuhan-



kebutuhan yang sifatnya bukan kebutuhan dasar psikologis seperti makan dan minum, bernafas dan lain sebagainya dapat ditekan oleh komitmen bersama sebab hanya komitmen bersama yang mampu menekan keinginan individual. Sebab seorang individu PNS akan bertindak tidak cukup dengan pengetahuan akan aturan, namun dibutuhkan kepercayaan dan niat serta konsistensi untuk tidak tergoda rayuan politik praktis.

References

- E. Koswara, Teori-teori kepribadian, (bandung: eresco, 1991).
- Erich Fromm, Dari Perkembangan Menuju Sosialisme Humanistik, (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2016),
- George Boeree, Personality Theories “melacak kepribadian anda bersama psikolog dunia”, (Jogjakarta: prisma sophie, 2010).
- Gustiana & Achmad Zulfikar, dalam Proseding Seminar Nasional Pilkada Serentak, Universitas Hasanudin, 10 November 2015.
- <http://aceh.tribunnews.com/2018/02/20/7-larangan-pns-di-tahun-politik-dari-beri-like-sosmed-hingga-foto-bareng?page=2> 06:12 06/05/2018
- M. Abed al-Jabiri, Sosiologi Politik Islam “pendekatan Historis-kritis, terj. M. Firdaus (Jakarta: Gelar Hidup, 2016).
- Max Weber, On Charisma And Institution Building, (chicago an London: university of chicago Press, 977)
- Nigro, F.A dan Nigro, L.G., Modern Public Administration, New York: Harper & Row, Publishers, 1980.
- Rita L. Atkinson, dkk. Pengantar Psikologi, edisi kesebelas, jilid I, (Jakarta: Interakssara, 1992).
- Saleh Choirul, Zauhar Soesilo, Supriyono Bambang, Islamy M. I rfan 2013. Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Aparatur. Universitas Brawijaya Press
- Waldo, Dwight, 1980, the enterprice, of public administration , chandler and sharp publisher Inc. Novanto CA.
- Akot, Bulent, ‘The Perspective of Psychological Freedom and Avoiding Freedom According to Erich Fromm’, *Hamdard Islamicus*, 43.2 (2020)
- Bennett, J, *The Enchantment of Modern Life* (degruyter.com, 2016)



<<https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9781400884537/html>>

Kim, Pan Suk, 'The Development of Modern Public Administration in East Asia', *International Review of Administrative Sciences*, 83.2 (2017)
<<https://doi.org/10.1177/0020852316685162>>

